POLICY BRIEF

STRATEGI TATA KELOLA PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM SERTIFIKAT HALAL GRATIS (SEHATI)

Tim Penyusun:

Nur Ambia Arma, M.AP (Ketua)

Dr. Indar Fauziah Ulfah, S.E.I., M.E (Anggota)

Dr. Faizal Madya, S.IP., M.Si (Anggota)

UNIVERSITAS TERBUKA
MAKING HIGHER EDUCATION OPEN TO ALL

Ringkasan Eksekutif

Program Sertifikasi Halal Gratis merupakan kebijakan yang diusung oleh Kementerian Agama sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang semakin ketat. Selain itu, Kemenag menilai, dampak pandemi yang telah dilalui Indonesia telah mengakibatkan pada menurunnya iklim usaha. Sehingga diperlukannya label halal yang diharapkan dapat menjadi pemantik semangat baru agar pelaku usaha dapat bangkit dari keterpurukan semenjak pandemi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Batam telah mendeklarasikan dukungannya dan menargetkan sekitar 8.000 UMK di Kota Batam mendapatkan sertifikasi halal di tahun 2024. Diperlukan strategi tata kelola pemerintahan yang baik agar mampu mencapai tujuan tersebut. Hasil survey kepuasan masyarakat menunjukkan nilai yang baik, akan tetapi sebenarnya bukan pemerintah langsung yang memberikan pelayanan akan tetapi melalui lembaga sertifikat halal (sektor swasta). Kemudian hasil penelitian menemukan beberapa kelemahan dan ancaman, seperti keabsahan sertifikat halal yang masih dipertanyakan, belum ada kolaborasi dan sinergitas antara SKPD, tidak ada legalitas dari pemerintah setempat terkait program SEHATI, data belum terintegrasi yang menyebabkan data ganda, terdapat pendamping yang tidak berkomitmen, produk import tidak berizin banyak beredar, serta sulitnya menemukan LPH makanan olahan. Maka policy brief ini memberikan berbagai rekomendasi seperti membangun kolaborasi multipihak untuk perluasan dan percepatan program, membuat legalitas program SEHATI, mengembangkan system data terintegrasi, memperkuat pengawasan produk impor dengan dukungan sosialisasi dan kolaborasi lembaga sertifikat halal, serta mendorong pembentukan LPH lokal.

Pendahuluan

Pada era globalisasi ini, keberlanjutan ekonomi suatu kota menjadi krusial untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya. Di tengah ketidakpastian ekonomi, Kementerian Agama telah meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang semakin ketat. Selain itu, Kemenag menilai, dampak pandemi yang telah dilalui Indonesia telah mengakibatkan pada menurunnya iklim usaha. Sehingga diperlukannya label halal yang diharapkan dapat menjadi pemantik semangat baru agar pelaku usaha dapat bangkit dari keterpurukan semenjak pandemi. Kemudian melalui sertifikasi dan label halal dianggap dapat mengundang pelanggan loyal dan merupakan bisnis yang sangat prospektif (Warto dan Syamsuri, 2020).

Pogram Sehati ditujukan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) karena menurut Kemenag masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal (Andrios, 2021). Oleh karena itu, program sehati menjadi bagian dari komitmen Kementerian Agama dalam memberikan dukungan perolehan sertifikasi halal di Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha agar dapat memperoleh sertifikasi halal secara gratis, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi tuntutan konsumen yang semakin sadar akan kehalalan produk. Menurut Masyhuri et al. (2018) keberlanjutan ekonomi di Tingkat lokal tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, namun mencakup juga aspek-aspek seperti keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Penerapan program sehati ini dapat dilihat pula sebagai Upaya untuk memenuhi ketiga dimensi keberlanjutan yakni, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan kesetaraan peluang bagi pelaku usaha dan merangsang permintaan pasar terhadap produk lokal yang ramah lingkungan.

Program SEHATI menciptakan relevansi yang signifikan dengan prinsip administrasi publik. Melalui pemberian sertifikat halal secara gratis, pemerintah berarti telah berupaya menciptakan kebijakan yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menyediakan produk yang halal. Hal ini sejalan dengan konsep "New Public Service" yang menekankan orientasi pada hasil dan pelayanan yang berkualitas (Denhardt & Denhardt, 2015).

Kota Batam sebagai salah satu pusat ekonomi dan perdagangan di Indonesia, memandang penting untuk mewujudkan keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Kota Batam yang berada pada posisi strategis yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan negara Singapura mendatang peluang yang luas dalam meningkatkan perekonomian. Sehingga Pemerintah Kota Batam menganggap bahwa label halal menjadi factor penting yang harus diperhatikan (DPRD Kota Batam, 2015). Oleh sebab itu, Program sertifikasi halal secara grtis menjadi salah satu bantuan yang tidak boleh terlewatkan.

Pemerintah Kota Batam sangat antusias mendukung adanya program SEHATI yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ini. Dari target 8.000 UMKM tersertifikasi halal hingga 2024 (kepri.antarnews.com, 2023) dan telah terealisasi sebanyak 5.927 UMKM di Batam sudah memiliki sertifikasi halal (batampos.jawapos.com, 2023). Untuk menuntaskan program SEHATI dengan efektif, Pemerintah Kota Batam perlu memperhatikan tata kelola yang baik termasuk sinergitas antara satuan kerja perangkat daerah yang saling bersinggungan dan memiliki tupoksi berkaitan dengan UMKM ataupun industry makanan yang memerlukan sertifikat halal. Sinergi ini harus dilakukan agar tidak terjadinya data ganda. Sebagaimana dikatakan bahwa tata kelola berkaitan dengan kegiatan politik yaitu tentang koordinasi dan pengambilan keputusan dan eksistensinya dijelaskan oleh batasan kapasitas manusia (Chhotray dan Stoker, 2009).

Peran Stakeholder

1. Sekretarian Daerah Kota Batam Bagian Perekonomian

Dalam kaitannya dengan program SEHATI ini, pemerintah kota Batam diwakilkan sekretariat daerah melalui bagian perekonomian. Sejalan dengan Namanya, yaitu bagian perekonomian, maka peran bagian ini bekerja menyangkut dengan aspek perekonomian Kota Batam. Program SEHATI merupakan bagian daripada tugas bagian perekonomian karena menyangkut dengan para pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara, Sekretariat Daerah Kota Batam Bagian Perekonomian memiliki peran yang strategis untuk keberhasilan implementasi program SEHATI, meliputi:

a. Perumus kebijakan ekonomi. Menyusun kebijakan yang strategis di bidang ekonomi termasuk perencanaan Pembangunan ekonomi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan Masyarakat.

b. Koordinator dan singkronisasi. Bagian perekonomian harus mengkoordinasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi antara SKPD, instansi vertical, maupun dengan pihak luar untuk menciptakan sinergi Pembangunan ekonomi.

c. Fasilitasi dan pembinaan. Bagian ini juga berperan dalam memberikan dukungan kepada pelaku usaha baik skala kecil, menengah maupun besar termasuk memfasilitasi iklim investasi yang kondusif serta harus melakukan pembinaan terhadap UMKM tersebut.

d. Monitoring dan melakukan evaluasi. Bahwa bagian perekonomian juga berperan dalam pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan dan program yang dijalankan di sektor ekonomi. Setelah pemantauan perlu juga dilakukan evaluasi untuk melihat ketercapaian pelaksanaan.

e. Pengelolaan data ekonomi. Sebagaimana yang kita pahami, perkembangan zaman menunut kita beradaptasi lebih cepat menggunakan teknologi yang juga semakin berkembang. Untuk menyimpan segala pelaksanaan kegiatan dan hasil dari implementasi program pada sektor ekonomi, bagian perekonomian berperan penting dalam mengelola data dan informasi terkait indicator ekonomi daerah sebagai basis data untuk mendukung perumusan kebijakan secara rill dikemudian hari.

2.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas koperasi dan usaha mikro Kota Batam juga memiliki peran yang strategis dalam mendukung tercapainya implementasi dari program Kementerian Agama yang mengharuskan setiap UMKM memiliki sertifikat halal. Beberapa tugas dan fungsi dinas ini terkait program SEHATI adalah bahwa dinas ini bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan pada usaha mikro. Kemudian dinas ini juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat, lembaga sertifikasi halal, dengan pelaku umkm yang menjadi binaan mereka. Peran penting ini untuk memastikan bahwa program SEHATI dapat menjangkau UMKM secara luas dan merata bagi Masyarakat Kota Batam. Khusunya untuk pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan akses informasi dan sumber daya dalam mengurus sertifikasi halal secara mandiri.

Dalam implementasi berkaitan dengan program SEHATI, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan fasilitasi dalam seluruh proses pengajuan sertifikat halal. Hal ini juga mencakup pelaksanaan sosialisasi program ke semua umkm yang jadi binaan mereka. Setelah itu, dinas ini juga membantu setiap umkm dalam melengkapi berkas atau persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan hingga memberikan pendampingan teknis terkait proses verifikasi dan validasi. Pendampingan teknis ini bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari peningkatan kualitas produk dan daya saing di pasar local maupun global.

Selain melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam juga berperan dalam membangun kolaborasi dengan lembaga sertifikasi halal dan Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini, kerjasama yang dibangun dinas ini yaitu dengan lembaga sertifikasi halal Politeknik Batam. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program mulai dari penyediaan informasi teknis, pelatihan, hingga percepatan proses sertifikasi halal. Hal ini dilakukan karena kebutuhan memfasilitasi jumlah pelaku usaha yang tidak sedikit. Sehingga dengan bekerjasama dapat membantu proses pembuatan sertifikat halal bagi seluruh binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dapat terselesaikan dengan cepat. Menjalin kerjasama seperti ini juga menjadi kunci dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi program.

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Mengkoordinasikan adanya kebijakan dari Kementerian Agama yang mewajibkan pelaku usaha kecil khususnya makanan, untuk memiliki sertifikat halal. Sehingga berkenaan dengan itu, Disperindag mengkoordinasikan pula adanya pelaksanaan program mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Secara sederhanyanya, Disperindag berperan mensosialisasikan dan mengedukasi ikm binaannya (khusus yang berkaitan dengan makanan) terkait pentingnya mendapatkan sertifikat halal.

b. Fasilitasi dan Koordinasi Lintas Sektor. Selain mensosialisasikan dan mengedukasi, Disperindag juga memiliki peran untuk memfasilitasi serta berkoordinasi lintas sektor. Hal ini dilakukan, karena seperti yang Sudah disampaikan sebelumnya, bahwa tugas dan fungsi utama Disperindag tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan pembuatan sertifikat halal. Oleh karena itu, Diperindag membutuhkan bantuan oleh pihak luar untuk membantu ikm binaannya mendapatkan sertifikat halal. Dalam hal ini, DIsperindag menjalin kolaborasi dengan lembaga sertifikat halal diluar pemerintah yaitu "Halal Center Cendikia Muslin (HCCM)". Diperindag memfasilitasi ikm binaannya untuk mendapatkan pendampinga dari lembaga HCCM agar mendapatkan sertifikat halal. Kemudian, Disperindag berkoordinasi langsung dengan HCCM berkaitan dengan pendampingan terhadap ikm binaannya.

4. Kecamatan

a. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran pelaku usaha. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti pertemuan rutin, penyuluhan di Tingkat kelurhan, dan kolaborasi dengan lembaga sertifikat halal untuk mengadakan forum pertemuan pengedukasian tentang program SEHATI. Upaya-upaya ini dilakukan agar memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang pentingnya sertifikat halal, baik untuk memenuhi standar regulasi maupun untuk meningkatkan daya tarik produk di pasar.

b. Membantu dalam administrasi. Kecamatan berperan dalam membantu atau memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan usahanya dan mendapatkan surat ijin berusaha. Dalam prosesnya, kecamatan akan mendampingin secara administrasi seperti pengumpulan dokumen yang disyaratkan hingga proses dikeluarkannya surat ijin.

c. Menjembatani Masyarakat yang merupakan pelaku usaha untuk dibantu dan didampingi oleh lembaga sertifikat halal karena kecamatan tidak memiliki kapasitas untuk mendampingi sendiri. Oleh karena itu, ada peran koordinasi juga di dalamnya, antara kecamatan dengan pendamping dari lembaga sertifikat halal. Berkaitan dengan hal tersebut, kecamatan dibantu oleh HCCM untuk mendaftarkan produk-produk pelaku usaha yang ada di kecamatan.

d. Dukungan dalam peningkatkan kapasitas dan akses pasar melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pemberdayaan. Pelatihan ini mencakup manajemen usaha, inovasi produk, hingga strategi pemasaran yang berorientasi pada pasar halal. Kecamatan juga mendukung UMKM untuk memanfaatkan sertifikat halal sebagai modal meningkatkan akses pasar, baik melalui promosi lokal maupun penyertaan dalam pameran-pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak swasta. Dengan demikian, peran Kecamatan Sagulung tidak hanya terbatas pada pelaksanaan teknis program, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan di wilayah tersebut.

4. Lembaga Sertifikat Halal

Lembaga sertifikat halal merupakan entitas yang bertugas mendampingi Masyarakat pelaku usaha untuk mendaftar dan memferivikasi sampai memvalidasi berkas pengajuan agar menjadi syarat mendapatkan sertifikat halal. Dengan kata lain, lembaga sertifikat halal juga menjadi penentu dalam memastikan bahwa produk usaha telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat islam dan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Beberapa aktivitas yang dilakukan adalah proses verifikasi, audit, dan evaluasi yang ketat terhadap bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk UMKM.

Keberadaan lembaga ini juga memberikan legitimasi bagi produk yang telah tersertifikasi, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen, baik di pasar domestic maupun internasional. Dalam kaitannya untuk implementasi program SEHATI, lembaga ini terdiri atas pendamping-pendamping yang menjadi pionir lembaga untuk membantu proses mendapatkan sertifikat halal. Pendamping ini telah dilatih dan dilulus dalam tahap tes yang diberikan.

Jumlah lembaga sertifikat halal di Kota Batam, namun berikut ini 5 lembaga sertifikat halal terbanyak mendampingi Masyarakat Kota Batam:

Kecamatan	Jlh Pendaftar	Jlh SH	Jumlah Produk
Halal Center Cendikia Muslim	1.524	1.468	4.811
Pusat Kajian Halal LDPM	491	487	1.312
Politeknik Negeri Batam	484	480	1.084
LP3H Hidayatullah	343	339	653
Edukasi Wakaf Indonesia	163	160	1548

Sumber: SEHATI Metabase, 2024

Strategi Tata Kelola Pemerintah Kota Batam dalam Mewujudkan Program SEHATI berdasarkan Analisis SWOT

Banyak pakar yang menyatakan bahwa untuk menganalisis sebuah strategi baik dalam proyek, kegiatan ataupun tindakan khususnya pemerintah dalam sebuah kebijakan dapat dilakukan dengan analisis SWOT. Begitupun dalam pembahasan strategi pemerintah Kota Batam dalam rangka mengimplementasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terkait keharus setiap pelaku usaha kecil memiliki sertifikat halal untuk produk yang dijual khususnya dalam makanan. Sebagaimana yang diketahui bahwa program SEHATI ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukannya evaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Batam untuk mewujudkan kebijakan dari Kementerian Agama tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, analisis SWOT menjadi salah satu cara yang relevan dalam menguraikan faktor internal maupun eksternal seperti kekuatan (*strengh*), kelemahan (*weakness*), kesempatan atau peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Karena strategi ditetapkan untuk memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan, dan analisis SWOT berfokus pad dua faktor internal dan eksternal itu sebagai utama untuk dicarikan pemecahannya (Yunas et al., 2024).

1.Kekuatan (*Strengths*).

Kekuatan dalam analisis swot merupakan faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif dan dapat mendukung keberhasilan dari implementasi suatu program. Biasanya, dalam konteks pemerintahan, kekuatan dapat dilihat seperti dukungan kebijakan yang relevan, penyediaan infrastruktur yang memadai, bahkan yang terpenting dapat berupa kemampuan sumber daya yang kompeten. Berkaitan dengan implementasi program SEHATI yang dilakukan Pemerintah Kota Batam, hasil yang ditemukan dalam *forum group discussion* (FGD) berikut beberapa yang menjadi kekuatan yang dimiliki:

a. Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat
b. Sosialisasi yang dilakukan kuat
c. Sumber daya pemerintah yang kompeten
d. Adanya sumber daya finansial

2.**Kelemahan (*Weaknesses*)**

Meskipun program SEHATI telah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil di Kota Batam, dan melihat hasil survey kepuasan mereka terhadap tata kelola pemerintah dalam mengimplementasikan program SEHATI, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Kelemahan ini dapat mengindikasikan bahwa meskipun program bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi halal, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala yang perlu dievaluasi dan diperbaiki demi keberlanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD yang dilakukan, berikut yang menjadi kelemahan dalam implementasi program SEHATI di Pemerintah Kota Batam:

a. Keabsahan sertifikat halal dipertanyakan
b. Belum ada kolaborasi antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah
c. Tidak ada legalitas di Tingkat Pemerintah Kota Batam terkait Program SEHATI
d. Data belum terintegras

3.Peluang (*Opportunities*)

Program SEHATI ini pada dasarnya membuka berbagai kesempatan untuk pengembangan UMKM dan sektor ekonomi halal di Indonesia. Dengan sertifikasi halal gratis, program ini memberikan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Kesempatan ini juga membuka jalan bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, khususnya pasar yang mengutamakan produk halal. Berikut ini beberapa peluang yang ada di Pemerintah Kota Batam berkaitan dengan implementasi program SEHATI:

a. Banyaknya pendamping
b. Kerjasama yang dibangun dengan lembaga sertifikat halal baik
c. Antusias dan kesadaran masyarakat tinggi

4. Ancaman (*Threats*)

Meskipun dalam implementasi program SEHATI memiliki banyak peluang, terdapat juga beberapa ancaman yang dapat menghambat keberhasilannya dalam jangka panjang. Berikut merupakan ancamannya:

a. Adanya pendamping yang tidak berkomitmen
b. Produk import tidak berizin edar banyak ditemukan
c. Sulit menemukan LPH makanan olahan

Rekomendasi Kebijakan

Pelaksanaan Program SEHATI di Kota Batam memerlukan strategi yang matang agar tujuan utamanya, yaitu meningkatkan daya saing produk UMKM melalui sertifikasi gratis, dapat tercapai. Dalam konteks ini, analisis SWOT dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan program. Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap potensi yang dimiliki Kota Batam, identifikasi tantangan yang harus diatasi, dan perancangan langkah strategis untuk memaksimalkan hasil program. Dilihat dari kekuatan yang dimiliki, Pemerintah Kota Batam memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung UMKM dan ekonomi halal. Batam sebagai salah satu pusat perekonomian Indonesia memiliki infrastruktur yang cukup memadai dan akses pasar yang luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, kolaborasi yang dijalin dengan lembaga sertifikasi halal, menjadi kekuatan penting dalam pelaksanaan program SEHATI. Kehadiran lembaga seperti Halal Center Cendekia Muslim juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberian bantuan teknis kepada UMKM, yang menjadi aset yang sangat berharga dalam keberhasilan program. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah tidak adanya legalitas yang dikeluarkan Pemerintah Kota Batam terkait tata kelola pemerintahan untuk keberlanjutan mewujudkan kebijakan program SEHATI ini:

Faktor Internal / Faktor Eksternal	Kekuatan 1. Pelayanan pemerintah yang sangat baik 2. Sosialisasi yang dilakukan kuat 3. Sumber daya pemerintah yang kompeten 4. Adanya sumber daya finansial	Kelemahan 1. Keabsahan sertifikat halal dipertanyakan 2. Belum ada kolaborasi antar SKPD 3. Tidak ada legalitas 4. Data belum terintegrasi
Peluang: 1. Banyaknya pendamping 2. Kerjasama dengan lembaga sertifikat halal baik 3. Antusias dan kesadaran Masyarakat tinggi	Strategi SO: 1. Mengoptimalkan sosialisasi dengan dukungan pendamping halal 2. Memanfaatkan kompetensi SDM pemerintah untuk kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal 3. Mengelola sumber daya finansial untuk mendukung seluruh pelaku UMKM 4. Membangun kolaborasi multipihak untuk perluasan dan percepatan program	Strategi WO: 1. Membangun system kolaborasi antar SKPD 2. Membuat legalitas terkait program SEHATI 3. Memanfaatkan kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal untuk menciptakan pendamping yang berkomitmen 4. Mengembangkan system data terintegrasi
Ancaman: 1. Adanya pendamping yang tidak berkomitmen 2. Produk import tidak berizin edar banyak ditemukan 3. Sulit menemukan LPH makanan olahan 4. Kuota SEHATI terbatas	Strategi ST: 1. Meningkatkan komitmen pendamping halal dengan evaluasi yang ketat 2. Memperkuat pengawasan produk impor dengan dukungan sosialisasi dan kolaborasi lembaga sertifikasi 3. Pemerintah bekerjasama dengan sektor swasta dan BPJPH untuk	Strategi WT: 1. Meningkatkan akuntabilitas pendamping halal melalui system pengawasan dan sertifikasi ulang 2. Mengintegrasikan data antar SKPD untuk mengurangi ketergantungan kuota dari Kemenag

1. **Strategi Strengths - Opportunities (SO)**

Strategi ini lebih memanfaatkan kekuatan yang ada di internal secara maksimal agar dapat meraih peluang yang ada. Selain itu juga dapat meningkatkan efektivitas implementasi program dan memastikan bahwa keberlanjutan program SEHATI ini bisa bermanfaat bagi Masyarakat. Berdasarkan faktor internal (kekuatan) dan faktor eksternal (peluang) dengan berbagai indikator yang dijelaskan sebelumnya, maka strategi SO yang dapat dilakukan untuk mendukung keberlanjutan program SEHATI di Kota Batam adalah:

a. Mengoptimalkan sosialisasi dengan dukungan pendamping halal. Pemerintah dapat memanfaatkan sosialisasi yang kuat dan melibatkan banyak pendamping halal untuk memperluas jangkauan program SEHATI. Pendamping halal dapat diberdayakan sebagai agen perubahan di masyarakat, membantu menjelaskan manfaat program dan memotivasi partisipasi aktif dari berbagai kalangan.

b. Memanfaatkan kompetensi sumber daya pemerintah untuk memperkuat kerjasama. Dengan sumber daya manusia pemerintah yang kompeten, kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal dapat ditingkatkan. Kompetensi ini memungkinkan pemerintah untuk menjalankan peran sebagai fasilitator yang mendukung proses sertifikasi halal, sehingga lebih cepat, terorganisir, dan terintegrasi.

c. Mengalokasikan sumber daya finansial untuk mendukung kesadaran Masyarakat. Dengan adanya sumber daya finansial yang memadai, program SEHATI dapat mengalokasikan dana untuk kampanye publik yang inovatif dan mendalam. Kampanye ini dapat dirancang untuk meningkatkan antusiasme dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal dan manfaat yang mereka dapatkan melalui program tersebut.

d. Membangun kolaborasi multipihak untuk perluasan dan percepatan program. Menjalin kerjasama dengan HCCM sudah sangat baik, maka pemerintah perlu lebih meningkatkannya dengan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga sertifikat halal lainnya. Sehingga pemerintah dapat dengan cepat memfasilitasi seluruh pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Batam untuk mendapatkan sertifikat halal.

2. **Strategi Weaknesses - Opportunities (WO)**

Strategi kelemahan dan peluan ini memiliki tujuan untuk memanfaatkan peluang eksternal agar dapat mengatasi kelemahan yang ada di internal. Berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam kelemahan maupun peluang, berikut strategi WO yang efektif untuk dilakukan:

a. Membangun system kolaborasi antar SKPD. Banyaknya pendamping halal dapat menjadi katalisator untuk membangun kolaborasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pendamping halal dapat berfungsi sebagai penghubung untuk menyelaraskan kegiatan lintas sektor, seperti edukasi masyarakat, pengawasan produk halal, dan sertifikasi. Pemerintah dapat membentuk forum atau tim kerja lintas SKPD untuk memperbaiki koordinasi dan mencegah duplikasi data.

b. Membuat legalitas terkait program SEHATI. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal dapat dijadikan alasan utama untuk mempercepat pengesahan legalitas program oleh Pemkot Batam. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah dapat melakukan advokasi lebih kuat kepada pihak pembuat kebijakan untuk menetapkan dasar hukum yang memperkuat implementasi program SEHATI.

c. Memanfaatkan kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal untuk menciptakan pendamping yang berkomitmen. Pemerintah dapat mempererat hubungan dengan lembaga sertifikasi halal yang terpercaya untuk meningkatkan keabsahan sertifikasi halal yang dikeluarkan. Hal ini dapat mencakup penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih transparan, audit berkala, dan penyediaan sistem verifikasi sertifikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

d. Mengembangkan system data terintegrasi. Dengan peluang adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan lembaga sertifikasi halal, pemerintah dapat membangun sistem data yang terintegrasi antar OPD. Sistem ini akan membantu mengurangi duplikasi data, mempercepat proses sertifikasi, dan memberikan laporan yang lebih akurat untuk evaluasi program. Pendamping halal juga dapat dilibatkan untuk memastikan data yang masuk sesuai dengan realitas di lapangan.

3. Strategi Strengths - Threats (ST)

Strategi Strenghts-Threats (kekuatan – ancaman) memiliki tujuan untuk menggunakan berbagai kekuatan yang ada di internal sebagai landasan mengatasu atau meminimalkan dampak ancaman eksternal. Oleh karena itum berikut ini strategi ST yang dapat diterapkan:

a. Meningkatkan komitmen pendamping halal dengan evaluasi yang ketat. Untuk mengatasi pendamping halal yang tidak berkomitmen atau curang, pemerintah dapat memanfaatkan pelayanan yang baik untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pendamping. Pelatihan lanjutan dan pemberian penghargaan bagi pendamping berprestasi dapat mendorong motivasi dan akuntabilitas. Sistem pelaporan berbasis masyarakat juga dapat ditingkatkan untuk memastikan transparansi.

b. Memperkuat pengawasan produk impor dengan dukungan sosialisasi dan kolaborasi lembaga sertifikasi. Sosialisasi yang kuat dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko produk impor tanpa izin edar. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal untuk memperketat pengawasan di lapangan dan memperkuat pengendalian distribusi produk ilegal. Sistem pengaduan berbasis digital dapat diterapkan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

c. Pemerintah bekerjasama dengan sektor swasta dan BPJPH untuk membangun Lembaga Pemeriksa Halal makanan olahan. Dengan kompetensi yang dimiliki pemerintah dan kerjasama yang sudah terjalin baik dengan lembaga sertifikasi halal, pemerintah dapat mendorong pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) tambahan, khususnya untuk makanan olahan. Hal ini bisa dilakukan melalui kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, atau sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan LPH.

d. Mengoptimalkan sumber daya finansial untuk pelaku usaha yang tidak kebagian kuota SEHATI. Sumber daya finansial yang memadai dapat digunakan untuk mendukung program sertifikasi halal mandiri yang melibatkan lembaga lokal, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada kuota dari Kementerian Agama. Pendanaan ini juga dapat diarahkan untuk program subsidi sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang belum terjangkau oleh kuota nasional.

e. Memanfaatkan kesadaran Masyarakat untuk menekan peredaran produk tidak berizin. Antusiasme dan kesadaran masyarakat terhadap produk halal dapat dimanfaatkan untuk membangun jaringan pengawasan masyarakat. Program seperti *crowdsourcing* pengawasan melalui aplikasi atau platform digital dapat membantu pemerintah mendeteksi dan mengurangi peredaran produk impor illegal di pasar lokal.

4. Strategi Weaknesses - Threats (WT)

Strategi Weaknesses-Threats (WT) ini bertujuan agar dapat meminimalkan kelemahan internal sekaligus mengurangi dampak ancaman eksternal yang dapat menghambat implementasi program SEHATI di Kota Batam. Oleh karena itu, berikut ini strategi yang mungkin dapat dilakukan:

a. Meningkatkan akuntabilitas pendamping halal melalui system pengawasan dan sertifikasi ulang. Menghadapi pendamping halal yang tidak berkomitmen, pemerintah dapat menerapkan mekanisme pengawasan berbasis teknologi seperti pelaporan real-time dan system evaluasi kinerja. Pendamping yang terbukti melanggar

dapat diikutsertakan dalam pelatihan ulang atau dicabut izinnya. Strategi seperti ini memastikan bahwa hanya pendamping yang kompeten dan professional yang dapat berperan dalam program sehingga meningkatkan kepercayaan Masyarakat.

-

b. Mengintegrasikan data antar SKPD untuk mengurangi ketergantungan kuota dari Kemenag. Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian perlu menginisiasikan pengintegrasian data antar SKPD agar tidak terjadinya duplikasi pelaku usaha yang dibina antar SKPD. Hal ini juga dapat membantu mengatasi keterbatasan kuota dengan adanya perhitungan jumlah pelaku usaha yang riil.

c. Mendorong pembentukan LPH local. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) lokal. Selain itu, regulasi yang mempermudah pembentukan LPH baru perlu diprioritaskan.

d. Memperkuat legalitas program untuk mengurangi produk tidak berizin. Pemerintah perlu mempercepat pengesahan kebijakan atau peraturan daerah (Perda) yang memberikan dasar hukum kuat bagi program SEHATI. Legalitas ini juga mendukung pengawasan ketat terhadap produk impor ilegal yang beredar di pasar. Dengan dasar hukum yang jelas, pemerintah memiliki otoritas yang lebih kuat untuk mengatur distribusi produk halal dan meningkatkan kredibilitas.

e. Melibatkan Masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan produk illegal. Pemerintah dapat mengedukasi masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan produk impor tanpa izin edar melalui aplikasi pengaduan atau hotline. Program penghargaan untuk pelaporan yang valid dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini menciptakan pengawasan berbasis komunitas yang membantu pemerintah mengurangi ancaman distribusi produk ilegal.

Referensi

Andrios, Benny. 2021. Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK. Dikutip melalui https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis- bagi-umk-sf13tb

Antara Kepri. 2023. Pemkot Batam targetkan sebanyak 8.000 UMKM tersertifikasi halal hingga 2024. diakses online melalui: https://kepri.antaranews.com/berita/168576/pemkot-batam-targetkan- sebanyak-8000-umkm-tersertifikasi-halal-hingga-2024

Batampos. 2023. 5.927 UMKM di Batam Sudah Miliki Sertifikat Halal, Ini Cara Dapatkan Sertifikat Halal. Diakses onlie melalui: https://batampos.jawapos.com/infokota/08/12/2023/5-927-umkm-di-batam- sudah-miliki-sertifikat-halal-ini-cara-dapatkan-sertifikat-halal/

Chhotray, Vasudha dan Stoker, Gerry. 2009. Governance Theory and Practice: A Cross-Disiplinary Approach. New York: Palgrave Macmillan

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). The New Public Service: Serving, Not Steering. Routledge.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. 2015. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis di Kota Batam. Diakses melalui chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jdih.batam.go.id/upload/NA%20PRODUK%20HALAL.pdf

Warto dan Syamsuri. 2020.Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Binis Produk Halal di Indonesia. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 2, No.1. Doi: 10.31000/almaal/v2il.280.